ABSTRAK

Judul tesis ini adalah PENGENAAN PAJAK BERGANDA BAGI SUBKONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI, yang difokuskan pada penelitian yuridis normatif. Masalah yang dibahas difokuskan pada siapa yang dibebani Pajak Pertambahan Nilai diantara mainkontraktor dan subkontraktor dalam subkontrak pekerjaan konstruksi dan apa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada mainkontraktor dan subkontraktor dalam rangka subkontrak pekerjaan jasa konstruksi melanggar rezim pajak ganda.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menyebutkan bahwa dalam hal ini jasa konstruksi adalah jasa kena pajak, yakni jasa yang dibebani pajak namun dalam keadaan tertentu terdapat subkontraktor pekerjaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisis dalam penerapannya terdapat permasalahan yang timbul ketika pemungutan PPN atas jasa konstruksi tersebut, karena pekerjaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh dua pihak yaitu mainkontraktor dan subkontraktor yang didasarkan oleh subkontrak pekerjaan jasa konstruksi untuk keperluan pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Subkontrak dan Jasa Konstruksi